

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peranan dan kedudukan pegawai negeri sangat menentukan dalam setiap organisasi pemerintah sebab pegawai negeri itu sendiri merupakan tulang punggung pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Akan tetapi di dalam pelaksanaan dan penyelenggaraannya yang beraneka ragam itu banyak mengalami kendala karena masalah pegawai negeri adalah masalah manusia dengan berbagai macam tingkat kecakapan atau keahlian dan juga sifat-sifatnya.

Bahwa pegawai negeri sipil merupakan aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional telah diketahui dan diakui sejangka lama. Kedudukannya sangat menentukan berhasil tidaknya tujuan pemerintah adalah ditentukan dan tergantung daripada aparatur negaranya yaitu pegawai negeri.

Dalam zaman modern ini, kemajuan teknologi telah dapat menggantikan sebagian besar tugas-tugas manusia. Pekerjaan dengan ketelitian dan resiko yang tinggi telah diserahkan pada robot-robot. Demikian pula untuk mengejar produksi maksimum. Tanpa mengenal waktu, fungsi mesin-mesin pekerja ini telah menggantikan tenaga manusia. Meskipun demikian faktor manusia tetap merupakan

faktor penentu dan pengambil keputusan akhir. Sesuai dengan apa yang dikatakan Arifin Abdurachman bahwa :

“Dalam suatu penyelenggaraan kerja maka manusialah yang menduduki tempat yang vital. Teknik permesinan dapat ditingkatkan tetapi apabila tidak ada manusia yang menjalankan mesin-mesin maka mesin-mesin itu akan menjadi besi tua dan mati”.¹

Sehingga tanpa manusia tujuan akan tetap tinggal tujuan belaka, bahkan dapat dipastikan bahwa organisasi ini sendiripun tidak mungkin ada.

Untuk kelancaran jalannya organisasi dalam usaha mencapai tujuan diperlukan adanya manajemen yang baik yaitu semua kegiatan didasarkan atas prinsip efisiensi dan efektivitas kerja. Prinsip seperti ini akan dapat dijalankan jika tenaga pelaksanaannya terdiri dari pegawai-pegawai yang memiliki keahlian, kecakapan dan kemampuan kerja yang tinggi dan juga dilandasi dengan rasa pengabdian dan tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.

Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang tercantum di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tergantung antara lain dari kesempurnaan para aparatur negara yang dalam hal ini pegawai negeri.

Untuk hal yang demikian maka perlu dilakukan usaha pemberdayaan pegawai, karena pegawai yang berdaya guna adalah pegawai yang mempunyai kemampuan yang tinggi untuk mengoptimalkan pemanfaatan segala sumber yang

¹ Arifin Abrulrachman, *Persoalan Manusia Dalam Manajemen*, Majalah Administrasi Negara, LAN, Jakarta, Tanpa Tahun, hal. 23.